

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz, Tunku, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, 2003).

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UII Press, 1995).

Asshidiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaiteraan MK RI, 2006).

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Andi Hamzah, Jur, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Bisri, Ilhami *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia*.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Emong Sapardja, Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002).

Enschede, CH. J., *Beginselen van Straafrecht*, (Deventer: Kluwer, 2008).

- Fahrojih, Ikhwan dan Mokh. Najih, *Menggugat Peran DPR dan BPK RI dalam Reformasi Keuangan Negara*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008).
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Meier, M, Gerald dan James E. Rauch, *Leading Issues in Economic Development*, (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- N. M. Spelt, Dan J.B.J.M, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, : Alumni, 2003).
- Palan, R. *Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*, (Jakarta: PPM, 2007).
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Raharjo, Satjipto *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- R. Siantur, S., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982).
- Ramli, Samsul, dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).
- Soetami, Siti, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditma, 2001).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun).
- Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun).
- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara).
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas).

B. Jurnal Internasional/Jurnal Nasional

Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2, Mei 2014, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan””, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, “berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Timbo Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, 2016, DOI:10.31078/jk1335

Endang Komara, “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia”, Jurnal Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Volume 4, Nomor 1, 2019 DOI: <https://doi.org/10.2121/mp.v4i1.1120.g999>

Prasojo, Eko, dan Laode Rudita, “Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 8, Nomor 1, 2014, hal. 13-29 R. Palan, <http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik>

Susilawati, Syarifuddin, M. Aditya Farhan Nasution, “Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara”, Jurnal Al Hkimah, Vol. 3., No. 4., 2022 DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i4.6387>

C. Hasil Penelitian

Maizardi, Jurnal Tesis, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”. <https://doi.org/10.31933/law.v1i1.7>

Azhary, “Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya”, (Jakarta: UII Press, 1995), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82567>

Materna Ayu Novita Sekar Arum, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah”, Repositori Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UAJY, 2015, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6942>

Fethi Ben Jomaa Ahmed, “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and

Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur DOI:

<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.595>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 Ayat 3

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

E. Putusan

Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI

Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

F. Website/Internet

Elana Nasty, Aparatur Sipil Negara, diakses melalui

https://www.kompasiana.com/enty_lafina_nasution/5b9517f1677ffb687165d9b3/aparatursipil-negara,

diakses pada tanggal

6 September 2023, pukul; 23.51 WIB

Carlos K. Y. Paath, Jumlah ASN di Indonesia 4.351.490 Orang, diakses melalui

website [https:// www.beritasatu.com/nasional/515506/jumlah-asndi-indonesia-](https://www.beritasatu.com/nasional/515506/jumlah-asndi-indonesia-4351490-orang)

4351490-orang, diakses pada tanggal 6 September 2023, puku; 23.58 WIB